



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI SUTAMI
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN
3. NHK : 757474

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.365.600.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/120 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/60 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
3. Tanah Seluas 600 m2 di KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 630.000.000		
4. Tanah Seluas 936 m2 di KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 982.800.000		
5. Tanah Seluas 936 m2 di KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 982.800.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	86.500.000
1. MOBIL, NISSAN STASION WAGON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
3. MOTOR, HONDA LEGENDA2 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
4. MOTOR, HONDA BENLY Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	666.432.619
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----



Sub Total	Rp.	4.129.032.619
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.129.032.619

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.